Anggaran Belum Cair ....

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

jung beres.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Karawang, Danu Hamidi kepada awak media mengakui, sejauh ini DPRD Karawang belum mendapat informasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pilkades di tengah wabah covid-19 telah rampung.

Ia mendesak Pemkab Karawang khususnya kepada Asda I, Bagian Pemerintahaan, Bagian Hukum, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar segera menyelesaikannya. "Perbup Penyelenggaraan Pilkades 2021 ini segera diselesaikan, mengingat pelaksanaan Pilkades kan kurang lebih satu bulan lagi. Jangan sampai sosialisasi berkaitan tentang Pilkades ini bisa terhambat," ungkap Danu kepada awak media, kemarin.

Meski demikian, ia pun memahami kehatian-hatian Pemkab Karawang dalam membuat Perbup Pilkades 177 Desa yang dilangsungkan di tengah pandemi. Apalagi semua aturan teknis, kata dia, tak boleh bertentangan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2020 terkait protokol kesehatan, termasuk soal TPS yang tk boleh melebihi 500 pemilih. Artinya, membuka opsi banyak TPS per desa yang melaksanakan Pilkades.

"Sehingga dengan adanya Permendagri tersebut disesuaikan bahwa pelaksanaan Pilkades itu tidak boleh lebih dari 500 orang dalam setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujarnya.

Tak hanya soal regulasi, Danu juga mengingatkan agar Pemkab Karawang segera mencairkan anggaran pilkades yang akan digunakan oleh panita pemilihan tiap desa (panitia sebelas) yang sejauh ini tak kunjung cair.

"Selain perbup Pemerintah Kabupaten Karawang juga kami harapkan untuk permasalahan pembiayaan, agar segera dicairkan sesuai dengan tahapan juga kebutuhannya," tukasnya.

Sebelumnya, Sejak dibentuk dan dilantik pada November 2020 lalu. Panitia Pilkades 177 desa di Kabupaten Karawang, harus menelan pil pahit di awal masa kerjanya. Pasalnya, sudah bekerja selama tiga bulan terakhir. Anggaran Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang, belum juga turun.

Diketahui, hal ini merupakan hal biasa dalam penyelenggaran Pilkades. Setiap tahun, panitia sebelas bekerja tanpa anggaran. Untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka sehari-hari. Tak jarang, mereka mencari dana talang dari pihak ke tiga.

Seperti diungkapkan Ketua Panitia Pilkades Cilamaya, Dida Rayendra. Selama masa persiapan awal. Panitia Pilkades bergerak dengan menggunakan anggaran seadanya yang bersumber dari dana talang. Mulia dari pembentukan, pelantikan, hingga perencanaan. Dilakukan tanpa anggaran dari kabupaten.

Sesuai jadwal, sebut Dida, anggaran APBD untuk Pilkades 177 desa harusnya turun di pertengahan bulan Februari 2021 nanti. Itu pun, tidak mengcover seluruh anggaran kebutuhan ril dalam pelaksanan kegiatan Pilkades.

"Anggaran Pilkades dari Pemda untuk Desa Cilamaya Rp. 144 jutaan. Sedangkan kebutuhan ril pelaksanaan Pilkades dengan jumlah hak pilih hampir 10 ribu jiwa, sebanyak Rp. 249 jutaan," ungkap Dida, kepada KBE, Rabu, (9/1) kemarin.

Dida bilang, sesuai aturan yang tertuang dalam Perbup nomor 64 tahun 2020 tentang Pilkades. Panitia dilarang memungut uang pendaftaran dari calon kades yang akan bertarung.

Ada pun untuk menutupi kekurangan anggaran itu. Dida mengaku sudah berkoordinasi dengan BPD dan Pemerintah Desa Cilamaya. Untuk menggunakan anggaran APBDes dari pengelolaan tanah bengkok desa.

"Kita sudah komitmen. Tidak akan memungut uang pendaftaran dari calon kades," tandasnya.

Hal serupa juga dirasakan Panitia Pilkades Rawagempol Wetan (Rawet), Kecamatan Cilamaya Wetan. Besarnya biaya awal operasional Panitia Pilkades. Harus ditanggung udunan antar panitia sebelas sebagai dana talang.

Ketua Panitia Pilkades Rawet, Daday Abi Darda menuturkan, sejauh ini, panitia Pilkades Rawet bertahan dengan dana APBDes yang sudah dikeluarkan lebih awal.

Untuk anggaran yang bersumber dari APBD, sebut Daday, Desa Rawet mendapat jatah Rp. 105 jutaan. Sedangkan kebutuhan ril pelaksanaan Pilkades pertengahan Maret 2021 nanti. Sebesar Rp. 135 jutaan.

"Jadi yang kekurangan Rp. 30 jutaan itu akan ditanggung dari APBDes. Sesuai aturan, tidak boleh kita pungut calon kades yang mau bertarung," kata Daday.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, Nurhasan mengatakan, seluruh panitia sebelas di Kecamatan Cilamaya Wetan sudah sepakat. Untuk tidak memungut uang pendaftaran kepada calon kades. Meski pun, anggaran yang digelontorkan Peda Karawang terhitung masih sangat minim.

Nurhasan bilang, mekanisme pencairan dana Pilkades dari APBD yang selalu terlambat. Kerap kali menimbulkan persoalan di bawah. Terlebih, bagi desa yang tak memiliki tanah bengkok ada APBDes yang memadai untuk menutup kebutuhan panitia.

Tak jarang, kara Nurhasan, ketika panitia sebelas minta anggaran ke BPD. Tapi di desa ternyata tidak ada anggaran. Tak jarang itu menimbulkan konflik di internal desa.

"Kalau pun mendesak, terpaksa pakai dana talang pihak ke tiga. Tapi panitia rugi. Biasanya itu ada bunganya," ujar Nurhasan.

"Dalam aturan boleh minta pada pihak ke tiga. Tapi sampai sejauh ini, pihak swasta belum ada yang mau mendanai Pilkades. Karena dianggap tidak ada untungnya bagi mereka," tandasnya.

Nurhasan berharap, untuk pelaksanaan Pilkades serentak selanjutnya. Ketika seluruh panitia Pilkades dilantik. Saat itu juga, Pemda Karawang menggelontorkan anggaran APBD. Agar kerja mereka lebih maksimal.

"Kalau anggarannya digelontorkan di awal, tidak perlu lagi ada istilah dana talang," pungkasnya. **(bbs/wyd/mhs)**